



MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : B/ 1236 /M.SM.01.00/2019
Sifat : Segera
Hal : Pendaftaran CPNS Tahun 2019
Bagi Penyandang Disabilitas

19 November 2019

Yth.

1. Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat
2. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah
di Tempat

Bersama ini kami beritahukan bahwa telah dilakukan rapat koordinasi tanggal 15 November 2019 terkait dengan persyaratan pendaftaran penerimaan CPNS tahun 2019 bagi penyandang disabilitas yang dihadiri perwakilan dari Kementerian Sosial, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Ketenagakerjaan, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, Kementerian Kesehatan, Badan Kepegawaian Negara, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dan Tim QA Panselnas, serta beberapa forum pokja yang menangani penyandang disabilitas.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Menteri PANRB mengingatkan kembali implementasi Peraturan Menteri PANRB nomor 23 tahun 2019 bahwa para penyandang disabilitas (fisik, sensorik, mental, dan/atau intelektual) dapat mendaftar pada Formasi Khusus Disabilitas, Formasi Khusus Lainnya selain Formasi Khusus Disabilitas, atau Formasi Umum, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Bagi instansi yang sudah mengumumkan penerimaan CPNS tahun 2019 pada sscasn.bkn.go.id yang mencantumkan persyaratan yang tidak berdasarkan kompetensi (*seperti persyaratan dapat berbicara, melihat, membedakan warna, atau mampu beraktivitas aktif secara mandiri tanpa kursi roda*) agar ditinjau kembali. Bagi instansi yang belum mengumumkan penerimaan CPNS pada sscasn.bkn.go.id agar tidak mencantumkan persyaratan sebagaimana dimaksud;
2. Para penyandang disabilitas dapat mendaftar pada formasi jabatan yang diinginkan apabila mempunyai ijazah yang kualifikasi pendidikannya bersesuaian dengan formasi jabatan dan kualifikasi pendidikan yang tercantum dalam rincian/lampiran Keputusan Menteri PANRB di masing-masing instansi.

Demikian informasi yang dapat kami sampaikan untuk menjadi perhatian dan dapat dilaksanakan.



Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi,

Tjahjo Kumolo

Tembusan :

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Menko Polhukam;
3. Ombudsman RI;
4. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
5. Kepala BPKP.